

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan kurang gizi kronis yang dikarenakan kurang asupan gizi pada waktu yang panjang, maka bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan anak yaitu tinggi badan anak yang pendek atau rendah dari standar umumnya. Sesuai dengan standar dari WHO, seorang dinilai stunting jika indeks tinggi badan sesuai umur dalam Z- score tidak melebihi -2 Standar Deviasi. Balita yang stunting bisa susah mewujudkan pertumbuhan fisik dan bisa mengakibatkan terganggunya motorik dan kognitif yang lebih baik dan bisa meningkatkan resiko penyakit degeneratif di masa mendatang (Nurmiati Muchlis et al., 2022).

Sebagai perwujudan derajat kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat, maka diberikan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu berbentuk Upaya Kesehatan Perseorangan serta Masyarakat. Upaya kesehatan ini dilakukan berbentuk aktivitas melalui pendekatan Preventif, Promotif, Rehabilitatif, dan Kuratif yang dilakukan dengan menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan (Widniah et al., 2022).

Pada Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi “Dimana peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif adalah komitmen global, serta menjadi aset yang penting untuk negara dan bangsa Indonesia, sebagai perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan produktif dibutuhkan status gizi lebih baik, melalui perbaikan gizi yang berkesinambungan”.

Pemerintah sudah melakukan penetapan target untuk menurunkan stunting sejumlah 14% di tahun 2024. Agar bisa mewujudkan target ini, maka membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah, Pusat dan juga Desa dengan kegiatan nyata melaksanakan aktivitas dan program yang terintegrasi dan konvergen. Sebagai upaya mempercepat turunya stunting, pemerintah Indonesia dengan Perpres No. 72 tahun 2021 memberikan penetapan Perpres yang menggunakan konsep untuk menangani stunting yang integratif dan holistik melalui melibatkan dari multisektor dari tingkat desa dan pusat sehingga bisa menjangkau kelompok rentan misalnya calon pengantin, remaja, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak berusia 0-59 bulan (Peraturan Presiden No. 72, 2021)

Stunting merupakan suatu proses perkembangan anak yang dinilai telat, dan dikarenakan karena adanya malnutrisi pada waktu yang lama, maka menjadi permasalahan gizi kronis yang dirasakan negara berkembang khususnya Indonesia. Anak usia kurang dari 2

tahun menjadi subyek untuk mengetahui terjadinya stunting pada usia dini dan sebagai tujuan perbaikan status gizi mereka, sebab dalam masa tersebut, anak belum mendapatkan berbagai paparan dari faktor luas misalnya asupan makanan yang berpengaruh pada perkembangan anak. Dalam usia ini, anak merasakan proses perkembangan yang lebih baik dan masuk dalam masa periode emas, dan terjadi penambahan dan pematangan pada fungsi organnya (Silaban et al., 2021).

Secara global, tahun 2020 masih terdapat 149,3 juta atau sekitar 22,0 % balita mengalami stunting. Angka ini sudah menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada tahun 2000 yang mencapai 33,1 %. Walaupun begitu, penurunan kasus stunting pada balita masih jauh dari target *World Health Assembly* (WHA) yaitu sebesar 40 % pada tahun 2025. Jika dilihat per-regional, lebih dari setengah balita yang mengalami stunting pada tahun 2020 tinggal di Asia atau sekitar 53 % balita. Dari 135,9 balita stunting di Asia, lebih dari 11 % kasus terjadi di Asia Tenggara. Dampak jangka panjang masalah status gizi di Indonesia adalah stunting (Faradilla et al., 2022).

Batasan *world health organization* (WHO) untuk kasus stunting 20% sedangkan pemantauan status gizi tahun 2016, stunting indonesia mencapai 27,5 %. Hal ini berarti pertumbuhan yang tidak maksimal dialami oleh sekitar 8,9 juta anak indonesia, atau 1 dari 3 anak indonesia mengalami stunting, lebih dari 1/3 anak berusia di bawah 5

tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata (Lela & Rizki Amelia, 2022).

Pada tahun 2020, Indonesia berada pada urutan kedelapan dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia yaitu sekitar 30,8% (*Joint Child Malnutrition Estimates*, 2021). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting balita di tingkat nasional sebesar 6,4% selama 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan stunting dari 27,7% (2019) menjadi 24,4% (2021). Namun, tentu saja persentase kejadian balita stunting di Indonesia masih jauh dari target RPJMN 2024 yaitu sebesar 14%.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, melalui peraturan presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan fokus pada setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Intervensi Sensitif terkait kesehatan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan perempuan. Berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan stunting. Selain sejumlah regulasi, pemerintah juga menyusun kerangka kebijakan gerakan nasional percepatan gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan, yang dilaksanakan secara *konvergen, holistik, integratif*, dan berkualitas melalui kerja sama

multisektor di pusat, daerah, dan desa (Peraturan Presiden No. 28, 2020).

Persentase balita stunting, sesuai dengan WHO tahun 2019 keadaan Indonesia dikategorikan tinggi, yang mana prevalensi stunting sejumlah 27,67%. Anak dinilai stunting jika tinggi dan panjang badannya sesuai dengan umurnya yang lebih rendah dari standar yang ada atau lebih rendah dari Z-Score untuk indeks TB/U < -2 SD (Kemenkes, 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan di tiap tahunnya menargetkan dari 32,4% di tahun 2019 menjadi 29,2% di tahun 2020 sehingga pada tahun 2022, tingkat penurunan stunting menjadi 19,5%. . Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan SSGI 2019 (30.59%) dan menunjukkan penurunan pada tahun 2021 (27.4%). Persentase kejadian stunting terendah sampai tertinggi berdasarkan kabupaten/kota pada SSGI 2021 yaitu Makassar (18,8%) dan Jeneponto (37,9%).

Umumnya, pelayanan publik berhubungan pada aspek kehidupan yang begitu luas. Pada aktivitas negara, maka pemerintah mempunyai fungsi untuk pemberian beberapa layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari layanan berbentuk pengaturan atau layanan lainnya sebagai pemenuh keperluan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, utilitas serta yang lain.

Pada analisis kebijakan kesehatan, komunikasi memiliki peran utama sebab penerapannya perlu melihat apa yang hendak dikerjakan. Perintah melakukan kebijakan ini perlu dilanjutkan untuk Implementor yang konsisten dan tepat. Kurang sumber daya bisa menyebabkan implementasi kebijakan yang tidak tepat. Kecenderungan dan disposisi sikap penerapan ini menjadi kesepakatan dan keinginan pada lingkungan pelaksana sebagai penerapan kebijakan.

Bila penerapan kebijakan ini dilakukan dengan baik, maka bisa melihat apa yang perlu dikerjakan dan berkemampuan untuk menerapkan, namun juga perlu memiliki harapan sebagai penerapan kebijakannya. Stryktur birokrasi berdampak pada penerapannya dimana implementasi ini tidak bisa berhasil bisa memiliki kekurangan pada struktur birokrasinya.

Dalam upaya penanganan stunting harus secara konvergen dan menitikberatkan pada Intervensi Spesifik dan Sensitif. Berdasarkan intervensi spesifik terdapat beberapa penanganan yang ditujukan pada balita, yaitu Pemberian Imunisasi, Pemberian Vitamin A, Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Anak Kurus/Kekurangan Gizi, Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan, dan Penyediaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Intervensi Sensitif meliputi penyesiaan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi, menyediakan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan memberikan edukasi

kesehatan seksual, reproduksi serta gizi remaja. Sejalan dengan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur nomor 19 tahun 2022. Hingga tahun 2022, terdapat 17 Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota dalam pencegahan stunting.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2019 jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Makassar sebanyak 8.61%, pada tahun 2020 jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Makassar sebanyak 4,08%, pada tahun 2021 jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Makassar sebanyak 5,2%, pada tahun 2022 jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Makassar sebanyak 4,08% dan pada tahun 2023 jumlah balita yang mengalami stunting di Kota Makassar sebanyak 3,14%. Sehingga pada pemerintah melakukan upaya penanganan kasus stunting yang menitik beratkan pada pencegahannya bukan lagi proses pengobatan, sehingga pemerintah memberikan bantuan dana pencegahan yang diharapkan mampu memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak kita (Pratiwi Yunus et al., 2021).

Adapun lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala. Berdasarkan data awal dari Dinas Kesehatan, salah satu Kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Manggala menempati posisi ke-delapan stunting se Kota Makassar

dengan prevelensi stunting mencapai 2,97% dengan jumlah balita 288 balita stunting. Adapun status gizi berdasarkan data awal dari penanggung jawab bagian stunting di Puskesmas Bangkala pada tahun 2021 jumlah balita yang mengalami stunting di Puskesmas Bangkala sebanyak 75 balita dengan prevelensi 3,5%, pada tahun 2022 jumlah balita yang mengalami stunting di Puskesmas Bangkala sebanyak 99 balita dengan prevelensi 4,6%, pada tahun 2023 jumlah balita yang mengalami stunting di Puskesmas Bangkala sebanyak 87 balita dengan prevelensi 4,1%, dan pada tahun 2024 jumlah balita yang mengalami stunting di Puskesmas Bangkala sebanyak 99 balita dengan prevelensi 4,6%. Maka berdasarkan fenomena diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh informasi yang akurat mengenai bagaimana pelaksanaan Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Makassar Khususnya Wilayah Kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian imunisasi dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala?

- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian vitamin A dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala?
- c. Bagaimana pelaksanaan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kekurangan gizi dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya?
- d. Bagaimana pelaksanaan pemantauan dan promosi pertumbuhan dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala tahun 2024

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian imunisasi dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian vitamin A dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala.
- c. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi anak kekurangan gizi dalam kebijakan penanganan stunting

di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala.

- d. Untuk menganalisis pelaksanaan pemantauan dan promosi pertumbuhan dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Peneliti

Menambah pengetahuan dalam mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala tahun 2024

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengetahuan sebagai referensi serta acuan penelitian berikutnya mengenai kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala tahun 2024

3. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang kebijakan penanganan stunting di Kota Makassar khususnya wilayah kerja Puskesmas Bangkala Kecamatan Manggala tahun 2024